

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH
DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh :

**YULISA TRISNA
NIM. 2423760008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026**

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH
DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) dalam Bidang Hukum Tata Negara**

OLEH :

**YULISA TRISNA
NIM. 2423760008**

**PASCASARJANA HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.

Dr. Ismail Jalili, M.A.

NIP. 19640531 199103 1 001

NIP. 19740618 200901 1 004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Moch.Iqbal, M.Si
NIP. 19750526 200912 1 001

Nama : YULISA TRISNA

NIM : 2423760008

Tanggal Lahir : 23 Juli 1979



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**“KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu)”**

Penulis

YULISA TRISNA
NIM. 2423760008

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei
2026.

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Nurul Hak, M.A.	Ketua	17/5/2026	
2	Dr. Jul Hendri, Lc., M.Hum.	Sekretaris	18/05/2026	
3	Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I.	Anggota	18-5-2026	
4	Dr. Triyani Pujiastuti, S.Sos.I., MA.Si.	Anggota	18/5/2026	

Bengkulu, Mei 2026

Mengetahui,

Rektor UIN FAS Bengkulu

Direktur PPs UIN FAS Bengkulu



Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag.
NIP. 198711141993031002

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
NIP. 196903081996031005

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

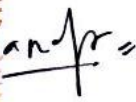
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dtuliskan sumbernya scara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya siap bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu,^{Mei} 2026
Saya yang menyatakan,




YULISA TRISNA
NIM. 2423760008

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd

NIP. : 19750925 200112 1 004

Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Yulisa Trisna

NIM : 2423760008

Program Studi : Hukum Tata Negara

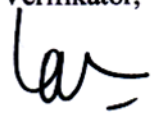
Judul Tesis : Kewenangan Panitia Pengawas Daerah dalam Pengawasan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siasyah (Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu).

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 11 %. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui Ketua Verifikator,


Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750925 200112 1 004

Bengkulu, 06 Mei 2026
Verifikator,


Dr. Moch. Iqbal, M.SI
NIP. 19750526 200912 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

"Ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah, dan kesungguhan adalah kunci untuk meraihnya."

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."
(QS. An-Najm: 39)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT,
karya sederhana ini kupersembahkan dengan tulus kepada:

Ayahanda tercinta, H. Syafaruddin Rejab Alm
dan Ibunda tersayang, Hj. Ratna Juwita
yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan berkorban tanpa batas.
Terima kasih atas cinta yang begitu besar, yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidupku.

Anak-anakku tersayang, Fariz Fulvian Azzam dan Aulia Ryana
yang menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan inspirasi dalam hidupku.
Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan cinta yang kalian berikan,
meskipun sering kali harus berbagi waktu dengan perjuangan ini.
Kalian adalah alasan terkuatku untuk terus melangkah dan tidak menyerah.

Keluarga besarku tercinta,
yang selalu memberikan semangat, doa, dan kehangatan di setiap proses yang kulalui.

Dosen pembimbingku,
yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan membuka jalan dalam penyelesaian tesis ini.

Sahabat dan teman seperjuangan,
yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini,
memberikan semangat di saat lelah, dan menguatkan di saat hampir menyerah.

Dan untuk diriku sendiri,
terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah.
Semua lelah ini akhirnya terbayarkan.
Semoga setiap langkah dan hasil dari karya ini
menjadi bagian dari ibadah dan membawa manfaat bagi sesama.
Aamiin...

ABSTRAK

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu)

Penulis :

**Yulisa Trisna
NIM. 2423760008**

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.**
- 2. Dr. Ismail Jalili, M.A.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kementerian Hukum dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Panwasda, Organisasi Bantuan Hukum (PBH), dan masyarakat penerima bantuan hukum, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Panwasda bersumber dari kewenangan Kementerian Hukum melalui mekanisme delegasi dan mandat, yang mencakup pengawasan pada tahap pra-penyaluran, pelaksanaan, dan pasca-penyaluran, serta penanganan pengaduan masyarakat. Secara normatif, kewenangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, pengawasan masih didominasi oleh aspek administratif dan belum optimal dalam pengawasan substantif, terutama dalam menjamin kualitas layanan bantuan hukum dan ketepatan sasaran penerima. Dalam perspektif fiqh siyasah, kewenangan Panwasda telah mencerminkan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah* (kemanfaatan umum). Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pengawasan substantif, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewenangan, Panwasda, Bantuan Hukum, Pengawasan, Fiqh Siyasah

ABSTRACT

**THE AUTHORITY OF THE REGIONAL SUPERVISORY COMMITTEE
TO SUPERVISE THE DISTRIBUTION OF LEGAL AID FUNDS
FOR THE POOR FROM A FIQH-ISLAMIC JURISPRUDENCE
PERSPECTIVE
(Study at the Bengkulu Regional Office of the Ministry of Law)**

Author :

**Yulisa Trisna
NIM. 2423760008**

Supervisors :

- 1. Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.**
- 2. Dr. Ismail Jalili, M.A.**

This study aims to analyze the authority of the Regional Supervisory Committee (Panwasda) of the Ministry of Law in supervising the distribution of legal aid funds for the poor in Bengkulu Province, as well as to examine it from the perspective of fiqh siyasah. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Panwasda, Legal Aid Organizations (OBH), and legal aid recipients, as well as through document analysis of relevant laws and regulations. The results show that the authority of Panwasda is derived from the Ministry of Law through delegation and mandate mechanisms, covering supervision at the pre-distribution, implementation, and post-distribution stages, as well as handling public complaints. Normatively, this authority is in accordance with existing laws and regulations. However, in practice, supervision is still dominated by administrative aspects and has not been optimal in substantive supervision, particularly in ensuring the quality of legal aid services and the accuracy of beneficiary targeting. From the perspective of fiqh siyasah, the authority of Panwasda reflects the principles of *al-'adalah* (justice), *amanah* (responsibility), and *maslahah* (public benefit). However, the implementation of these principles has not yet been fully optimal in a substantive sense. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing substantive supervision, and increasing public participation are necessary to achieve more effective and equitable supervision.

Keywords: Authority, Panwasda, Legal Aid, Supervision, Fiqh Siyasah

ملخص

سلطة اللجنة الرقابية الإقليمية
في الإشراف على توزيع أموال المساعدة القانونية
للفقراء من منظور الفقه الإسلامي
(دراسة أجريت في المكتب الإقليمي لوزارة العدل في بنغكولو)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلطة اللجنة الرقابية الإقليمية (بانواسدا) التابعة لوزارة العدل في الإشراف على توزيع أموال المساعدة القانونية للفقراء في محافظة بنغكولو، ودراستها من منظور السياسة الفقهية. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي ذو التوجه النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال مقابلات مع أعضاء بانواسدا، ومنظمات المساعدة القانونية، ومستفيدي المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تحليل الوثائق المتعلقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة. تُظهر النتائج أن سلطة هيئة المساعدة القانونية (بانواسدا) مستمدة من وزارة العدل عبر آليات التفويض والولاية، وتشمل الإشراف في مراحل ما قبل التوزيع والتنفيذ وما بعد التوزيع، بالإضافة إلى معالجة شكاوى الجمهور. وتتوافق هذه السلطة، من الناحية المعيارية، مع القوانين واللوائح السارية. إلا أنه عملياً، لا يزال الإشراف يطغى عليه الجانب الإداري، ولم يصل إلى المستوى الأمثل في الإشراف الموضوعي، لا سيما في ضمان جودة خدمات المساعدة القانونية ودقة استهداف المستفيدين. ومن منظور الفقه السياسي، تعكس سلطة هيئة المساعدة القانونية مبادئ العدالة والأمانة والمصلحة العامة. ومع ذلك، لم يصل تطبيق هذه المبادئ إلى المستوى الأمثل من الناحية الموضوعية. لذا، فإن تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين الإشراف الموضوعي، وزيادة مشاركة الجمهور، أمور ضرورية لتحقيق إشراف أكثر فعالية وإنصافاً.

الكلمات المفتاحية: السلطة، بانواسدا، المساعدة القانونية، الإشراف، الفقه السياسي...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafadzkan sebagai bentuk puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Kewenangan Panitia Pengawas Daerah dalam Pengawasan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Perspektif Siyasah Studi di Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk membawa risalah serta misi kemanusiaan sehingga manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Dr. Moch. Iqbal, M.Si, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag., Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ismail Jalili, M.A., Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran bersedia memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak dan Ibu Staf Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah banyak membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2024 di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, dalam penyusunan tesis ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik ke depannya.

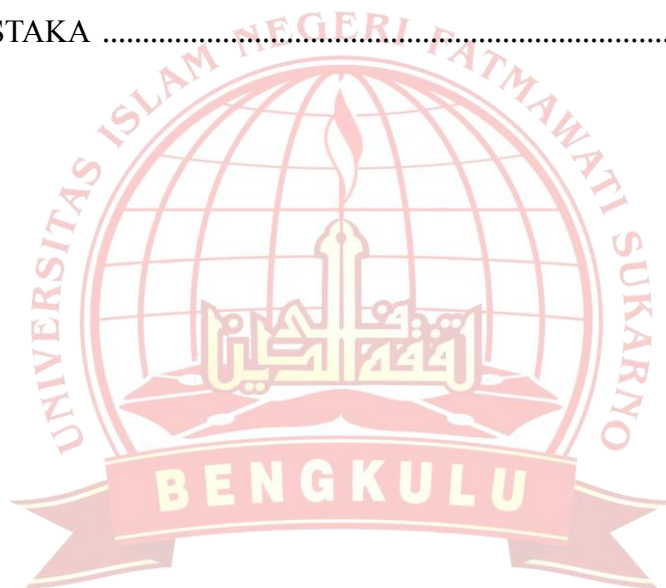
Bengkulu, Mei 2026
Penulis

Yulisa Trisna
NIM. 2423760008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
TAJRID	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II LANDASAN TEORI	 22
A. Teori Kewenangan (Authority Theory)	22
B. Teori Pengawasan dan Akuntabilitas Publik	24
C. Konsep Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	25
D. Peran Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kementerian Hukum	27
E. Kajian Fiqh Siyasah tentang Pengelolaan Dana Publik	30
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	 35
A. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	35
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Hukum	36
C. Kedudukan Panwasda Kanwil Kemenkum Bengkulu.....	39
D. Tugas dan Fungsi Panwasda Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu	42
E. Wilayah Kerja dan Ruang Lingkup Pengawasan Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Kanwil Kementerian	

Hukum Bengkulu	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kewenangan Panwasda dalam Melakukan Pengawasan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Bengkulu	51
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Panwasda dalam Pengawasan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Bengkulu	80
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar PBH Terakreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2027	46
Tabel 3.2 : Daftar Anggaran Kegiatan Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2026	47
Tabel 3.3 : Daftar Pennerima Kegiatan Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2026	48

